

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi Bab pendahuluan dalam tesis yang pada dasarnya dijadikan sebagai bab pengenalan untuk mendeskripsikan permasalahan awal dalam penelitian yang sudah ditempuh. Pada bab pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, berbagai permasalahan pembangunan berkelanjutan menjadi topik pembahasan yang krusial dan tergabung pada tiga sub sistem permasalahan yaitu masalah kemiskinan di perkotaan, masalah kualitas lingkungan hidup perkotaan dan masalah keamanan dan ketertiban perkotaan. Kemiskinan serta kerusakan lingkungan hidup merupakan ancaman utama bagi proses pembangunan berkelanjutan dengan melihat tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu mencapai masyarakat sejahtera (masyarakat berkelanjutan) dalam lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tentunya, kebutuhan dunia terhadap pembangunan di segala aspek sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsa dan Negara. Pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik (Poespowardojo, 1993, hlm 47). Sudah barang tentu peningkatan mutu di sini yang dimaksud adalah bukan hanya pada sektor ekonomis semata, melainkan meliputi seluruh aspek kehidupannya. Adapun ukuran yang dipakai untuk menunjukkan perbaikan hidup tersebut dapat berbeda-beda antara orang yang satu dan orang yang lain, atau antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain, atau antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain.

Di samping itu, manusia adalah tujuan pembangunan. Manusia bukan sekedar sejumlah relasi sosial dan karena itu tidak dapat dinilai semata-mata

sebagai faktor dalam masyarakat. Manusia dengan kekayaan sumber daya yang dimilikinya hidup dalam historisitas, namun hal itu tidak berarti bahwa eksistensi ditentukan dan bergantung sama sekali pada sejarah. Manusia adalah pribadi dan karena itu merupakan panggilan (*afgabe*) yang harus membangun untuk menentukan sejarah (Poespowardojo, 1993, hlm. 54-55). Dari uraian ini jelas, bahwa dalam pembangunan yang pertama dan utama yang menjadi fokus adalah manusianya, karena manusia adalah pelaku sekaligus tujuan pembangunan itu sendiri. Sebagai pelaku pembangunan, kualitas sumber daya manusia sangat menentukan corak masyarakat yang hendak diwujudkan.

Membentuk watak warga negara atau karakter bangsa yang bermartabat bukanlah perkara mudah, karena dibutuhkan *political will* atau komitmen, utamanya dari pihak pemerintah atau penguasa yang memiliki *power*. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa pada dua dasawarsa pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan nasional yang digarap pertama kali adalah di bidang politik yakni membangun bangsa dan karakter seluruh masyarakat Indonesia yang berisi semangat nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air (Wibisono, 1998, hlm. 8; Poespowardojo, 1991, hlm. 2). Baru pada tahapan pembangunan selanjutnya bidang ekonomi mulai digarap. Selanjutnya pembangunan bidang-bidang yang lain ikut digarap seiring dengan perkembangan dalam dan luar negeri, termasuk karena didorong oleh banyaknya kritik yang diarahkan pada paradigma pertumbuhan ekonomi yang berdampak negatif pada rusaknya lingkungan hidup dan diabaikannya pembangunan sosial-budaya.

Pendidikan dalam hal ini sering dikaitkan dengan transmisi pengetahuan dan pengembangan perilaku dan keterampilan sosial sebagai usaha memanusiakan manusia. Pendidikan juga merupakan transmisi nilai, baik di generasi yang sama maupun antar generasi dan lintas generasi. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan berdampak besar terhadap pengembangan karakter. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus berupaya mempromosikan melalui pendidikan untuk pengembangan karakter warga negara.

Hakekat pendidikan dipandang pula sebagai perilaku budaya dan merupakan kegiatan antar generasi. Artinya kegiatan pendidikan melibatkan generasi tua dan muda, dalam rangka mendorong yang muda menjadi warga masyarakat cerdas dan berbudaya (Dimiyati, 1989). Hal ini mencerminkan bahwa dalam mengembangkan karakter warga Negara perlu adanya keberlanjutan sebagai tali penyambung antara generasi sebelumnya ke generasi berikutnya untuk menggerakkan visi moral dalam membangun diversitas budaya yang mengikat tujuan-tujuan pembangunan secara universal.

Atas dasar ini, maka konsep dan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) kemudian mulai mendapat perhatian oleh semua kalangan, baik di tingkat nasional maupun global. Konsep dan paradigma ini mencoba mengakomodasi berbagai paradigma pembangunan, baik yang berasal dari pendukung paradigma pertumbuhan ekonomi, maupun dari kelompok pendukung paradigma lingkungan hidup dan sosial-budaya. Konsep dan paradigma pembangunan berkelanjutan juga sangat memperhatikan nasib generasi mendatang, karena dengan mengadakan pembangunan di bidang ekonomi, otomatis menggunakan sumber daya alam secara tidak terkontrol (Tjokrowinoto, 2002, hlm. 11).

Gerakan ini didukung oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014 bahwa :

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya, tanggungjawab sosial dan lingkungan alam/natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, hlm. 7)

Dukungan dan perhatian Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai puncak memperluas visi dunia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

yang memfokuskan perhatian pada masalah lingkungan, interelasi antara lingkungan dan isu-isu sosial ekonomi yang menyangkut kemiskinan maupun keterbelakangan dalam pembangunan. Lahirlah konsep Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (*Education Sustainable Development*) sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menyeimbangkan kemajuan ekosistem yang harus bersinergis dengan sumber daya alam.

Sekalipun Renstra Pengembangan Pendidikan Nasional (2010-2014) tidak secara eksplisit menyatakan komitmen terhadap ESD, tetapi pada dasarnya pendidikan nasional Indonesia didedikasikan pada keseluruhan aspek pembangunan nasional, khususnya pengembangan SDM yang bersesuaian dengan tuntutan pembangunan dalam konteks globalisasi. Oleh karenanya pengembangan dan implementasi konsep ESD di Indonesia, baik pada tataran kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan, perlu memperoleh perhatian dari semua kalangan pendidikan. Kepentingan ini bukan semata-mata didorong oleh komitmen politik Pemerintah, melainkan juga menjadi bagian dari upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan berkelanjutan yang dihadapi bangsa kita.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi penuh sebagai jalan pembangunan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi warga Negara di dalamnya. Hal ini didukung pandangan Walson-Jack (1999) dalam penelitian Olibie dan Akudolu (2013) bertajuk tentang *Toward a Functional Citizenship Education Curriculum in Nigerian Colleges of Education for Sustainable Development in the 21st Century*. Beliau mencatat bahwa : “*a world class citizenship education is essential to combating the fear, the ignorance, the prejudice, and apathy that undermine freedom today in form of ethnic, religious, racial and economic depressions*”. Maka dapat didefinisikan bahwa pendidikan kewarganegaraan di kelas dunia sangat penting untuk memerangi ketakutan, kebodohan, prasangka, dan apatis yang melemahkan kebebasan saat ini berupa depresi etnis, agama, ras, dan ekonomi. Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk ideal berusaha untuk melibatkan warga dalam komunitas masyarakat dan

sekolah dengan mengajarkan keterampilan warga Negara yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat sipil.

Lebih lanjut, Kerr (2004) menafsirkan Pendidikan Kewarganegaraan secara luas :

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.

Hal ini berarti Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu proses mempersiapkan orang-orang muda untuk berperan dan bertanggung jawab sebagai warga negara dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya (melalui sekolah, pengajaran dan pembelajaran) dalam proses persiapan warga Negara tersebut. Oleh karena itu, Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedekatan yang erat dengan *Education for Sustainable Development* yang menurut UNESCO (2009, hlm.1) memungkinkan warga Negara untuk mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang cara kita melakukan sesuatu, secara individu dan kolektif, baik lokal maupun global, yang akan meningkatkan kualitas hidup sekarang tanpa merusak planet ini untuk masa depan.

Untuk tujuan tersebut, pendidikan kewarganegaraan secara fungsional harus menyampaikan pengetahuan yang segar (*civic knowledge*), mengembangkan bakat yang ada dan menyampaikan keterampilan yang berguna (*civic skill*), sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan jenis kualitas hidup yang melibatkan rasa hormat tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk sumber daya, fauna dan flora yang ada di planet ini (*civic disposition*) yang tergabung dalam kompetensi kewarganegaraan yang dimiliki warga Negara seutuhnya. Pengembangan kompetensi kewarganegaraan ini harus menimbulkan pemahaman di antara siswa bahwa pembangunan nasional membutuhkan kontribusi yang bertanggung jawab dari masing-masing individu terlepas pangkat dan status dalam masyarakat. Pada dasarnya, ciri-ciri karakter privat dan publik seperti tanggung

jawab moral, disiplin diri, dan menghormati nilai dan manusia martabat setiap individu serta menghormati fauna dan flora di planet ini tidak hanya penting dalam pendidikan kewarganegaraan tetapi juga beberapa nilai yang melekat dalam ESD (*Education for Sustainable Development*).

Pendidikan kewarganegaraan dalam aspek instrumental adalah sarana programatik pendidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi-substansi aspek idil PKn yang di antaranya kurikulum, bahan ajar, guru, media, sumber belajar, alat penilaian, ruang belajar dan lingkungan. Beberapa komponen pembelajaran tersebut satu sama lain saling berhubungan dan tak boleh lepas. Adapun komponen yang kiranya kurang tersentuh oleh guru adalah pengorganisasian materi pembelajaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kualitas pembelajaran di kelas. Materi pembelajaran yang dipergunakan hendaknya dapat menggambarkan isu-isu aktual yang terjadi di lingkungannya (lokal maupun global). Materi pembelajaran (*instructional materials*) adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan (Komalasari, 2010, hlm. 23)

Merujuk PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 20 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang diperbaharui dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan, diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran. Begitu pula sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru memiliki kompetensi yang salah satunya kompetensi profesional dalam mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kemudian dipertegas melalui Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, yang antara lain mengatur tentang bagaimana guru dalam merencanakan proses pembelajaran ke dalam Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), salah satu elemen dalam RPP adalah mengembangkan materi pembelajaran. Materi Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Dengan demikian, guru memiliki kewenangan untuk mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa dan tuntutan zaman.

Pandangan konstruktivisme menjadi akar penting untuk diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar, pemilihan materi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Pandangan konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Von Glasersfeld (dalam Battencourt, 1989 dan Matthews, 1994) menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari ‘kenyataan’ (realitas). Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Proses pembentukan ini berjalan terus menerus setiap kali mengadakan reorganisasi karena adanya suatu pemahaman yang baru.

Pemilihan materi dalam bahan ajar yang hendak dituangkan senantiasa berdasarkan pada analisis *scope* dan *sequence*. *Scope* atau ruang lingkup isi kurikulum dimaksudkan untuk menyatakan keluasan dan kedalaman bahan, sedangkan *sequence* menyangkut urutan isi kurikulum (Taba, 1962, hlm. 291-292). Penentuan *scope* dalam bahan ajar memerlukan beberapa kriteria. Adapun menurut Nasution (1994, hlm. 233-235), kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1) bahan pelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai; 2) bahan pelajaran dipilih karena dianggap berharga sebagai warisan generasi yang lampau; 3) bahan pelajaran karena berguna untuk menguasai suatu disiplin ilmu; 4) bahan pelajaran dipilih karena dianggap berharga bagi manusia.

Kriteria tersebut menuntut adanya rekonstruksi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan mendatang terutama kaitannya dengan nilai, sikap dan kebiasaan yang diusung dalam membangun nilai keberlanjutan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengemban misi sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia yang sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai subjek *matter* pendidikan politik bangsa perlu memperhatikan perkembangan dan isu-isu global. Setidaknya sedikitnya ada lima belas isu global yang menjadi wacana yang aktual dan faktual. Perkembangan dan isu-isu global meliputi : *Climate Change (Global Warming)*, *Milinium Development Goals (MDGs)*, *Environmental Protection and Sustainable Development*, *Energy Shortage*, *Economic Property and Equalitz*, *Higher Education for Humame Purpose and Social Responsibity*, *Global Justice and Social Harmony*, *Political Development and Political Stability*, *Human Rights Issues as Security*, *Cultural Diversity and Tolerance yang ideal*, *Global Peace and global Governance*, *Dialog Among Civillzation*, *Humame us of Technology*, *Crisis Management such as post conflict as disasters* (Widodo, 2010, hlm.127).

Materi yang mengusung isu-isu perkembangan global di atas menarik perhatian peneliti dalam mengkaji *Cultural Diversity and Tolerance* untuk mengembangkan nilai-nilai keberlanjutan di masa yang akan datang. Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan Listiawati (2011) dengan tujuan mengetahui relevansi nilai-nilai Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development/ESD*) untuk diberikan kepada peserta didik di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar, terutama di kelas rendah, dan kesiapan guru melaksanakan ESD di Indonesia yang dapat dilihat melalui 1) pernah tidaknya guru membaca materi yang berkaitan dengan aspek-aspek dan nilai-nilai

pembangunan berkelanjutan dan 2) kepemilikan materi ESD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 81,34% responden menyatakan bahwa aspek-aspek atau nilai-nilai ESD relevan diajarkan di sekolah dasar, terutama di kelas rendah. Hasil lainnya menunjukkan bahwa responden guru sudah siap untuk melakukan pembelajaran tentang aspek-aspek ESD di sekolah. Ini ditunjukkan dengan 85,38% yang sebagian besar adalah guru menyatakan sudah pernah membaca materi tentang aspek-aspek ESD, dan 51,38% menyatakan memiliki materi tentang aspek-aspek ESD.

Kondisi umum di atas diawali dengan hasil yang positif bahwa materi ESD sangat relevan dibelajarkan di persekolahan. Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan wadah seluas-luasnya untuk pengkayaan materinya melalui ESD. Adapun materi yang digunakan dalam pembelajaran PPKn berdasar kurikulum 2013 mengacu pada ruang lingkup PPKn yang meliputi: 1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa; 2) UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia, dan 4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Permendikbud No. 58 Tahun 2014 Lampiran II).

Kajian *Cultural Diversity and Tolerance* termasuk dalam materi pembelajaran PPKn kelas VII Semester 2 tentang Keberagaman Suku, Agama, Ras, Budaya, dan Gender. Pengorganisasian materi yang sudah disajikan dalam buku teks pemerintah hendaknya dikembangkan dengan memuat nilai keberlanjutan di atas keragaman budaya yang mencakup : materi fakta (peristiwa/isu global), materi konsep (konsep keberlanjutan), materi prinsip (prinsip pembangunan keberlanjutan), materi prosedur (aktivitas, proyek budaya, dan produk budaya), dan materi nilai (nilai keberlanjutan, sikap dan kebiasaan) terintegrasi secara menyeluruh (Diadopsi dalam Komalasari, 2010, hlm. 34).

SMPN 5 Bandung sebagai subjek dan lokasi penelitian dari data awal yang diperoleh berkenaan dengan pengorganisasian materi dalam pembelajaran PPKn yaitu : 1) Siswa menganggap mata pelajaran PPKn hanya kurang menyentuh isu-isu global dan isu-isu kekinian ; 2) Siswa tidak memahami makna dari konsep tersebut dan tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata ; 3) Guru kurang terampil mengembangkan bahan ajar dan menuangkannya dalam pembelajaran di kelas, dan 4) Guru berorientasi pada target hasil penguasaan materi, sehingga seringkali mengabaikan bagaimana proses belajar siswa menuju penguasaan materi. Oleh karena itu, sekolah tersebut cocok diterapkan materi ESD yang memuat isu-isu aktual dan global dan meningkatkan kepedulian warga Negara dalam menyelesaikan permasalahan dunia.

Atas dasar asumsi tersebut, dirasa dapat membantu peserta didik di SMPN 5 Bandung yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan melainkan yang lebih penting adalah watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang didasari dengan nilai, sikap, dan kebiasaan. Hal tersebut menjadi rujukan penting bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan materi *Education Sustainable Development* dalam bahan ajar PPKn terhadap peningkatan *civic disposition* siswa di SMPN 5 Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk latar belakang penelitian sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya muatan nilai menghargai terhadap budaya bangsa Indonesia dalam diri generasi muda kini mengakibatkan warga Negara belum membentuk watak kewarganegaraan yang efektif dalam hal melakukan tindakan/sikap dan partisipasinya sebagai warga Negara muda. Maka perlu revitalisasi PKN sebagai ranah pembentukan karakter warga Negara.
2. Pengorganisasian materi dalam pembelajaran PPKn kurang menyentuh isu-isu global dan tidak disertai isu-isu kekinian sehingga kondisi tersebut

mengakibatkan pembelajaran menjadi sempit makna dan tidak sesuai dengan isu perkembangan zaman.

3. Pengorganisasian materi yang dilakukan berkaitan dengan penyusunan dan pengembangan bahan ajar belum mengakomodir ranah afektif dan psikomotorik siswa, hanya terfokus pada aspek kognitif saja. Maka dalam kondisi ini, materi PPKn perlu menitikberatkan pada kemampuan penguasaan ranah afektif dan psikomotor siswa.
4. Metode guru dalam menerapkan dan menuangkan bahan ajar dalam pembelajaran di kelas lebih berorientasi pada target hasil penguasaan materi, sehingga seringkali mengabaikan bagaimana proses belajar siswa menuju penguasaan materi.

Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi permasalahan pada fokus pengembangan materi dalam bahan ajar yang memuat pendidikan pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*) dan dampaknya terhadap peningkatan kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara umum, “Apakah terdapat perbedaan pengaruh penerapan materi *Education for Sustainable Development* dalam bahan ajar PPKn terhadap pengembangan *civic disposition* siswa di SMPN 5 Bandung?”. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah yang lebih rinci yang dapat dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan peningkatan karakter privat siswa antara kelas yang menerapkan materi *Education for Sustainable Development* (eksperimen) dengan kelas yang tidak menerapkan materi *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn (kontrol)?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan peningkatan karakter publik siswa antara kelas yang menerapkan materi *Education for Sustainable Development*

- (eksperimen) dengan kelas yang tidak menerapkan materi *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn?
3. Apakah terdapat perbedaan signifikan peningkatan watak kewarganegaraan siswa antara kelas yang menerapkan materi *Education for Sustainable Development* (eksperimen) dengan kelas yang tidak menerapkan materi *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn (kontrol)?
 4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan penerapan materi *Education for Sustainable Development* terhadap watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa?
 5. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan materi *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan ajar PPKn berbasis *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn terhadap peningkatan *civic disposition* siswa jenjang SMP.

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini di antaranya untuk menguji hipotesis dan menemukan :

1. Perbedaan signifikan peningkatan karakter privat siswa antara kelas yang menerapkan materi *Education for Sustainable Development* (eksperimen) dengan kelas yang tidak menerapkan materi *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn (kontrol).
2. Perbedaan signifikan peningkatan karakter publik siswa antara kelas yang menerapkan materi *Education for Sustainable Development* (eksperimen) dengan kelas yang tidak menerapkan materi *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn.
3. Perbedaan signifikan peningkatan watak kewarganegaraan siswa antara kelas yang menerapkan materi *Education for Sustainable Development* (eksperimen)

dengan kelas yang tidak menerapkan materi *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn (kontrol).

4. Pengaruh yang signifikan penerapan materi *Education for Sustainable Development* terhadap watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa.
5. Respon siswa terhadap penerapan materi *Education for Sustainable Development* dalam pembelajaran PPKn.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini ditinjau dari berbagai segi di antaranya adalah :

1. Manfaat dari segi teori.

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih keilmuan terutama kajian pustaka tentang integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*) dalam persekolahan yang diusung sebagai bentuk kepedulian dunia dalam mengembangkan kompetensi kearganegaraan (*civic disposition*) siswa.

2. Manfaat dari segi kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran dan menjawab perkembangan inovasi pemilihan materi pembelajaran yang tepat dan efektif dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang diterapkan di pendidikan formal sebagai masukan kepada pemerintah.

3. Manfaat dari segi praktik

- a. Bagi peserta didik

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan dalam memberikan kontribusi nilai, sikap dan kebiasaan terhadap isu-isu kewarganegaraan.

b. Bagi guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bahan ajar yang kaya akan nilai berkelanjutan untuk pembangunan dan berdampak pada pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bagi sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan kajian dan diskusi oleh para guru, kepala sekolah dan pengawas sebagai praktisi, sehingga meningkatkan mutu pendidikan formal yang ada di Indonesia.

d. Bagi institusi

Penelitian ini memiliki kontribusi kajian praktis mengenai pengorganisasian materi dalam mata pelajaran PPKn di lingkup persekolahan dan menjadi pengkajian LPTK sebagai pencetak pendidik.

4. Manfaat dari segi isu serta aksi sosial

Penelitian ini diharapkan memberikan pencerahan pengalaman hidup bagi peserta didik yang diarahkan oleh materi *Education for Sustainable Development* dalam rangka membelajarkan peserta didik untuk menjadi warga Negara yang partisipatif dan membantu generasi selanjutnya untuk memikirkan kondisi isu sosial saat ini.

H. Struktur Organisasi Tesis

Untuk perolehan gambaran tesis ini, peneliti memberikan struktur organisasi penelitian secara sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami disertasi ini. Penelitian ini terdiri atas lima bab, di antaranya: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi dan hipotesis penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis; 2) bab dua berupa kajian pustaka, penelitian terdahulu, posisi teoretis peneliti, dan paradigm penelitian; 3) bab tiga meliputi desain penelitian, lokasi, populasi dan sample penelitian, prosedur penelitian, definisi operasional, operasionalisasi variabel penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrument, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan isu etik; 4) bab empat mencakup deskripsi lokasi penelitian, temuan penelitian yang berisi hasil analisis deskriptif dan hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian yang berisi pemaparan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dikaitkan dengan teori, dalil, kajian pustaka, dan penelitian terdahulu; 5) bab lima meliputi simpulan, yang akan menyajikan uraian singkat mengenai hasil pembahasan penelitian dalam bentuk rekonseptualisasi peneliti, sedangkan implikasi dan rekomendasi ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau *follow up* dari hasil penelitian.